

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1. Latar Belakang**

Pada Undang-Undang (UU) No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, sekarang ini menjadi fokus utama pemerintah Indonesia dalam meningkatkan pembangunan nasional. Hal yang dapat ditempuh untuk pembangunan nasional adalah dengan cara, desa diberikan kewenangan untuk menjalankan dan mengelola system pemerintahannya sendiri. Kewenangan ini diberikan dari tingkat menengah ke daerah yang biasa disebut dengan desentralisasi. Pemerintahan yang diberikan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan efektivitas pelayanan pemerintahan sehingga mampu menjangkau semua lapisan Masyarakat Indonesia dan dapat menata desa dengan baik (Nadir 2013).

Di zaman yang modern ini, perkembangan dunia usaha yang sangat pesat menyebabkan banyak persaingan antar perusahaan. Akan tetapi pemerintah memprediksi bahwasannya banyak masyarakat yang ingin tinggal di kota dibandingkan desa, karena bagi mereka di kota adalah tempat mengais rupiah. Akan tetapi tidak salah kini di desa sudah diberikan wewenang untuk menjalankan pemerintahannya sendiri yaitu untuk mengelola dana desa tersebut. Perangkat yang ada di desa adalah kepala desa dan dibantu oleh perangkat-perangkat desa yang terdiri dari sekretaris desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksanaan teknis. Di desa sudah terdapat alokasi dana khusus untuk desa sendiri, tujuan dari dana desa tersebut

adalah untuk meningkatkan pelayanan publik masyarakat di desa. Dan di desa juga dituntut untuk meningkatkan pendapatan dana desa. Peningkatan pendapatan desa diharapkan akan meningkatkan kinerja manajerial. Pemerintah desa sebagai organisasi sektor publik harus memiliki kinerja yang mengutamakan kepentingan masyarakat serta mendorong pemerintah desa untuk selalu tanggap terhadap lingkungannya dan memberikan pelayanan yang terbaik, transparan, akuntabel, dan berkualitas (Putra, 2013).

Untuk dapat merealisasi tujuan dana didesa, pemerintah desa harus melakukan kinerja yang baik. Oleh karena itu, penyelenggaraan pemerintahan desa memerlukan kinerja manajerial yang setinggi-tingginya. Haryanti (2016) juga berpendapat bahwa kinerja manajerial sangat mempengaruhi dampak suatu organisasi. Apabila kinerja manajerial suatu organisasi ditingkatkan maka keberhasilan akan lebih mudah dicapai. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan kinerja manajerial perangkat desa yaitu seperti partisipasi penyusunan anggaran dan komitmen organisasi.

Di desa terdapat suatu anggaran yang harus dialokasikan kepada masyarakat. Akan tetapi dalam penyusunan anggaran tersebut diperlukannya suatu partisipasi dari perangkat desa tersebut. Partisipasi penyusunan anggaran mencakup semua elemen yang ada di dalam desa. Menurut Aulad, et al (2018) partisipasi penyusunan anggaran berkaitan erat dengan kinerja manajerial karena kinerja dari pemangku kepentingan akan mempengaruhi

proses penyusunan anggaran. Partisipasi anggaran dinilai berdasarkan tingkat keterlibatannya dan pengaruh perangkat desa dalam menentukan serta menyusun anggaran tersebut.

Fenomena terkait dengan perkembangan partisipasi penyusunan anggaran yaitu adanya banyak kasus penyimpangan dalam pengelolaan dana desa seperti pada kasus di Desa Banyurejo, Kec. Tempel, Kab. Sleman. Awal mula terjadinya kasus tersebut karena dari hasil perhitungan Inspektorat Pemkab Sleman, telah ditemukan kerugian negara sebesar Rp 633 juta. Penyimpangan ini dilakukan kepala desa pada tahun 2015 dan 2016. Dan juga adanya dugaan penggunaan aset desa dan galian C yang merugikan negara dan dapat merusak lingkungan. (harianjogja.com, SLEMAN). Hal tersebut membuktikan bahwa perlu adanya kesadaran akan pentingnya komitmen organisasi itu sendiri merupakan dorongan diri seseorang untuk melakukan sesuatu sehingga dapat mencapai tujuan organisasi. Pemimpin yang berkomitmen tinggi terhadap organisasinya akan mampu meningkatkan kinerja manajerialnya demi kelangsungan hidup organisasi tersebut. Sedangkan partisipasi dalam penyusunan anggaran dengan terlibat langsung dalam proses penyusunan anggaran sehingga perangkat desa dapat mengetahui apa yang akan dikerjakannya.

Penelitian yang sama mengenai dampak partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja manajerial yang dipimpin oleh Kusuma (2016), Saraswati (2015) dan Wiratmi (2014) yang menemukan bahwa partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial. Sementara itu, Hafridebri (2013), Medhayanti dan Suardhana (2015)

menemukan bahwa partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja manajerial.

Penelitian yang berpengaruh pada komitmen organisasi terhadap kinerja manajerial yang pernah dilakukan oleh Widyawati (2017), Sultan (2011) dan Suyamto (2015) dimana hal tersebut menghasilkan bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial. Nouri (1998), juga pernah melakukan penelitian mengenai pengaruh komitmen organisasi terhadap kinerja manajerial. Dalam Supriyono (2004) serta Vijaya dan Salain (2018) yang menyatakan bahwa komitmen organisasi dengan kinerja manajerial memiliki pengaruh yang negatif.

Pemerintah daerah adalah organisasi sektor publik yang dapat berperan utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Ulum & Sofyani 2016). Pemerintahan desa merupakan salah satu tingkat pemerintahan daerah yang paling rendah. Maka dari itu, pemerintah desa harus menyeimbangkan kinerja manajerial dengan baik dan tingkat kesejahteraan masyarakat yang tinggi agar masyarakat dapat memperoleh pelayanan yang efektif. Penampilan setiap orang dalam suatu yayasan tercermin dalam pameran pendirian tersebut. Pameran yayasan berarti pelaksanaan karya yang diciptakan oleh pengawas di lembaga sesuai dengan tugasnya diasosiasi (Fitria, Idris, dan Kusuma 2014).

Dalam melaksanakan pemerintahan di desa, aparat pemerintah masih banyak mengalami kendala. Hal itu tentu mempengaruhi dan menghambat kinerja pemerintah desa tersebut, mengingat pemerintahan desa merupakan organisasi publik yang paling berperan dalam melakukan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Harapan dari pelayanan pemerintah desa masih dianggap belum ideal. Penyelenggaraan pemerintahan desa tidak terlepas dari berbagai keluhan masyarakat setempat terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Desa tersebut.

Adanya kasus penyelewengan tanah kas desa di daerah Candibinangun, Kapanewon Pakem, Kab. Sleman. Kepala Desa Candibinangun resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus Mafia Tanah Kas Desa (TKD). Kasus tersebut dimulai pada tahun 2012, sebidang tanah tersebut disewakan kepada PT Jogja Eco Wisata, yang akan digunakan untuk taman rekreasi. Akan tetapi uang sewa dari Pt tersebut tidak dimasukkan ke APBDes terlebih dahulu. Tersangkat langsung memerintahkan agar uang sewa dibagikan kepada para perangkat desa secara asal-asalan dan tidak sesuai dengan peraturan desa. Hal tersebut mengakibatkan uang yang masuk ke kas Desa sangatlah kecil dan tidak sesuai dengan yang seharusnya. (jogjaprovo.go.id)

Kasus mengenai dana desa semakin marak beberapa tahun belakangan ini. Pada tahun 2016 hingga Agustus 2017 ada 110 kasus penyelewengan dana desa yang ditemukan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW).

Dari hasil penelitian Sofyani *et al.*, (2018) menyatakan bahwa masih

terdapat permasalahan dalam perumusan rencana strategi yang salah satunya berkaitan dengan masalah paradigma masyarakat mengenai pembangunan adalah fisik desa. Hal ini disebabkan masyarakat masih belum memiliki visi dari desa mereka sendiri yang akhirnya perencanaan yang disusun berdasarkan suatu reaksi dari suatu kondisi yang tidak diinginkan, dan bukan berupa aksi yang berdasarkan pada perencanaan strategis. Keadaan ini membuktikan kinerja manajerial pemerintah desa belum maksimal dan sesuai harapan.

Selain itu, hasil dari pengamatan langsung terlihat ada berbagai kendala yang dihadapi oleh aparat pemerintah desa mengenai kinerja. Dibuktikan dengan masih terlihat banyak pekerjaan-pekerjaan yang tidak maksimal. Selain itu juga masih terdapat kebiasaan buruk aparat kerja yang sering tidak menaati jam kerja.

Menurut Mulyadi (2001) kinerja merupakan mengukur efektivitas operasional organisasi, bagian organisasi, dan karyawannya yang didasarkan atas tujuan, sasaran, standar, serta kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Penilaian kinerja bertujuan untuk membuat karyawan lebih termotivasi dalam melaksanakan tugas-tugasnya dalam mencapai tujuan atau sasaran organisasi dan bawahan untuk mematuhi standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya, supaya menghasilkan tindakan dan hasil yang diinginkan.

Kinerja Manajerial merupakan variabel yang dapat meningkatkan kelangsungan hidup suatu organisasi. Keadaan dan kondisi yang terus berubah menuntut para pionir untuk terus mengikuti perubahan tersebut. Keputusan yang diambil dan tindakan yang diambil organisasi tidak akan

sejalan dengan tujuan organisasi apabila seorang pemimpin tidak patuh terhadap perubahan yang sudah ada.

Salah satu faktor yang menentukan keberhasilan kinerja manajerial pada organisasi sektor publik dapat dilihat dari proses perencanaan. Perencanaan dapat didefinisikan sebagai pemilihan dan penetapan tujuan organisasi dan penentuan strategi, langkah, kebijaksanaan, program, proyek, metode dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan (Halim dan Kusufi, M 2012). Salah satu alat dari perencanaan adalah anggaran. Halim dan Kusufi (2012) menyatakan anggaran merupakan alat perencanaan manajemen untuk mencapai tujuan organisasi sehingga organisasi akan mengetahui hal yang harus dilakukan dan mengetahui arahkebijakan yang akan dibuat. Pembahasan mengenai pentingnya kinerja juga terdapat dalam Al-Qur'an Qs. Al-Ahqaf Ayat 19 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ دَرَجَاتٌ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ  
 وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهِمْ وَوَالِدِهِمْ يَنْزَغُونَ  
 وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ  
 وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ حَتَّىٰ تَبَلَغَ آجُلَهُمْ بَعَثُوا إِلَيْنَا  
 كِتَابًا وَعَدُّوا يَوْمَهُمُ الْكَيْدَ  
 وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ  
 وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ حَتَّىٰ تَبَلَغَ آجُلَهُمْ بَعَثُوا إِلَيْنَا  
 كِتَابًا وَعَدُّوا يَوْمَهُمُ الْكَيْدَ  
 وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ  
 وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ حَتَّىٰ تَبَلَغَ آجُلَهُمْ بَعَثُوا إِلَيْنَا  
 كِتَابًا وَعَدُّوا يَوْمَهُمُ الْكَيْدَ

Terjemahan:

*“Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan.”*

Dari ayat itu, Allah akan membalas perbuatan manusia sekecil apapun sesuai apa yang telah mereka kerjakan. Artinya dengan asumsi seseorang bekerja dengan baik dan menunjukkan kinerja yang baik bagi organisasi, maka ia akan memperoleh hasil yang baik dari pekerjaannya dan memberikan manfaat bagi organisasi.

Kabupaten Sleman adalah salah satu kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia, dengan luas wilayah 574,82 km<sup>2</sup>. Kabupaten Sleman terdiri dari 17 Kecamatan, 86 Desa, dan 1212 pedukuhan.



Tabel 1. 1

**Jumlah Desa di Kabupaten Sleman**

No.	Kecamatan	Jumlah Desa
1.	Moyudan	4
2.	Minggir	5
3.	Seyegan	5
4.	Godean	7
5.	Gamping	5
6.	Mlati	5
7.	Depok	3
8.	Berbah	4
9.	Prambanan	6
10.	Kalsan	4
11.	Ngemplak	5
12.	Ngaglik	6
13.	Sleman	5
14.	Tempel	8
15.	Turi	4
16.	Pakem	5
17.	Cangkringan	5
JUMLAH		86

Berdasarkan uraian penjelasan mengenai latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk meneliti **“Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Manajerial (Studi Empiris Pada Pemerintah Desa Di Kabupaten Sleman)”**. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian. Salain, dkk (2018) dan Suwindrawati. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah adanya penambahan variabel mediasi (Subagyo, 2014) yaitu Motivasi dan studi empiris dilakukan pada Pemerintahan Desa Kabupaten Sleman.

## 2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka secara umum dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

- a. Apakah partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja manajerial Pemerintah Desa Kabupaten Sleman?
- b. Apakah partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi kerja pegawai Pemerintah Desa Kabupaten Sleman?
- c. Apakah komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi kerja pegawai Pemerintah Desa Kabupaten Sleman?
- d. Apakah komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja manajerial Pemerintah Desa Kabupaten Sleman?
- e. Apakah motivasi kerja pegawai berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja manajerial Pemerintah Desa Kabupaten Sleman?
- f. Apakah motivasi kerja memediasi pengaruh antara partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja manajerial pada Pemerintah Desa Kabupaten Sleman?
- g. Apakah motivasi kerja memediasi pengaruh antara komitmen organisasi terhadap kinerja manajerial pada Pemerintah Desa Kabupaten Sleman?

## 3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk menguji dan memberikan bukti empiris apakah partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap

kinerja manajerial Pemerintah Desa Kabupaten Sleman.

- b. Untuk menguji dan memberikan bukti empiris apakah partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi kerja pegawai Pemerintah Desa Kabupaten Sleman.
- c. Untuk menguji dan memberikan bukti empiris apakah komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi kerja pegawai pemerintah Desa Kabupaten Sleman.
- d. Untuk menguji dan memberikan bukti empiris apakah komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja manajerial Pemerintah Desa Kabupaten Sleman.
- e. Untuk menguji dan memberikan bukti empiris apakah motivasi kerja pegawai berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja manajerial Pemerintah Desa Kabupaten Sleman.
- f. Untuk menguji dan memberikan bukti empiris apakah motivasi kerja memediasi pengaruh antara partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja manajerial pada Pemerintah Desa Kabupaten Sleman.
- g. Untuk menguji dan memberikan bukti empiris apakah motivasi kerja memediasi pengaruh antara komitmen organisasi terhadap kinerja manajerial pada Pemerintah Desa Kabupaten Sleman.

#### **4. Manfaat Penelitian**

##### **a. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada literatur akuntansi sektor publik terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja instansi pemerintah desa. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi untuk penyusunan penelitian

pada masa yang akan datang terkait dengan topik yang sama.

**b. Manfaat Praktis**

1) Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini dapat dijadikan input dalam penerapan pola-pola gaya kepemimpinan yang relatif tepat pada pemerintah desa dalam upaya meningkatkan kinerja manajerial.

2) Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana pendataan bagi masyarakat mengenai kinerja manajerial pemerintah desa dengan bukti eksperimental yaitu tentang partisipasi penyusunan anggaran, komitmen organisasi, dan motivasi kerja terhadap kinerja manajerial pemerintah desa.

3) Bagi perguruan tinggi

Penelitian ini diharapkan mampu menambah referensi tulisan di ranah publik, khususnya tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja manajerial pemerintah desa.

4) Bagi peneliti

Manfaatnya bagi peneliti sendiri antara lain memperluas pengetahuan dan mengembangkan kapasitas berpikir kritis mengenai partisipasi penyusunan anggaran, komitmen organisasi, dan motivasi kerja terhadap kinerja manajerial pemerintah desa.